

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dilihat dari letak geografisnya merupakan negara agraris yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup baik, hal tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor basis perekonomian di Indonesia. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah dalam upaya melaksanakan pembangunan dan menciptakan ketahanan pangan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi petani. Oleh sebab itu, sektor pertanian tidak lepas oleh ketersediaan input pertanian seperti pupuk, benih, teknologi, lahan dan lain sebagainya. Semuanya harus saling melengkapi sehingga mampu menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu solusi pembangunan bangsa Indonesia di masa depan.

Kegiatan pertanian tidak dapat terlepas oleh penggunaan pupuk yang bertujuan untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas dari hasil pertanian. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian guna menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional yaitu dengan membuat kebijakan penyediaan pupuk bersubsidi bagi para petani. Kebijakan pupuk bersubsidi telah diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan. Program ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan petani terhadap pupuk dengan harga yang terjangkau. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk telah diterapkan pemerintah mulai dari tahap perencanaan kebutuhan petani, penetapan harga

eceran tertinggi (HET), besaran subsidi serta sistem distribusi ke pengguna pupuk (Rachman dan Sudaryanto, 2010).

Upaya yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Timur dalam menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang sesuai dengan ketetapan pemerintah maka teretuslah kebijakan kartu tani. Kartu tani adalah kartu yang bekerjasama dengan BNI yang dimanfaatkan khusus sebagai sarana transaksi pembayaran pupuk yang disubsidi oleh pemerintah serta dapat membaca alokasi pupuk bersubsidi yang terdapat di BNI (Bank Negara Indonesia) dengan menggunakan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) yang ditempatkan di pengecer atau kios. Adanya kartu tani ini bisa memenuhi aspek 6 tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu. Kartu Tani ini sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah disusun selama 1 tahun sebelumnya untuk memudahkan penyaluran pupuk.

Program kartu tani mulai direncanakan pada tahun 2016 oleh pemerintah, namun baru banyak digunakan pada tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan penggunaan kartu tani masih dirasa memiliki banyak kendala terlebih lagi di tingkat petani. Surat ketua KPK No. 8/4079/KSP001/1-16/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 mewajibkan penggunaan kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi. Hingga 31 Agustus 2020, jumlah petani yang terdata dalam e-RDKK adalah 13,9 juta petani. Sementara itu, kartu tani yang sudah tercetak sebanyak 9,3 juta unit dan terdistribusi sebanyak 6,2 juta unit. Namun yang baru aktif menggunakannya hanya 1,2 juta petani dari keseluruhan yang terdaftar di e-RDKK. Oleh sebab itu, pelaksanaan program kartu tani mungkin akan dapat dilaksanakan serentak pada awal tahun 2021.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten pengguna pupuk bersubsidi terkhusus kecamatan Krian yang menjadi daerah pedagang pupuk bersubsidi yang besar di kabupaten Sidoarjo karena merupakan daerah pertanian padi sawah yang cukup besar. Luas lahan sawah di semua kecamatan di kabupaten Sidoarjo ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. 1 Data Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas Lahan Sawah (Ha)
1	Sidoarjo	310.00
2	Buduran	556.00
3	Candi	1,044.00
4	Porong	810.00
5	Krembung	1,812.00
6	Tulangan	1,639.00
7	Tanggulangin	1,298.00
8	Jabon	1,383.00
9	Krian	1,160.00
10	Balongsendo	1,631.00
11	Wonoayu	2,013.00
12	Tarik	2,103.00
13	Prambon	1,982.00
14	Taman	652.00
15	Waru	56.00
16	Gedangan	633.00
17	Sedati	593.00
18	Sukodono	1,498.00
	Total	21,173.00

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Tabel 1.1 menunjukkan Kecamatan Krian memiliki luas sawah yang cukup besar di kabupaten Sidoarjo yaitu sebesar 1.160 Ha. Kecamatan Krian terletak di 20 km sebelah barat daya Surabaya. Secara geografis kecamatan ini berada di lokasi yang strategis, karena terletak di antara 4 ibu kota kabupaten/kotamadya, yaitu Surabaya (timur), Sidoarjo (selatan), Gresik (utara), dan Mojokerto (barat).

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo digunakan sebagai objek penelitian atas dasar pertimbangan yaitu seperti kondisi wilayah dan lingkungan. Pertama,

potensi sumber daya alam di Kecamatan Krian yang cukup baik, khususnya dipertanian. Seperti sawah, lahan kering dimana pemanfaatan kedua lahan tersebut meliputi tanaman jagung, padi, palawija, dan lain sebagainya. Kedua, lingkungan petani di Kecamatan Krian sangat kompak dalam melakukan proses budidaya komoditasnya di tandai dengan adanya kelompok tani. Ketiga, dukungan instansi terkait, pemerintah desa di Krian sangat aktif dan berani terjun langsung ke petani baik berupa penyuluhan, kebijakan pertanian, dan juga teknologi pertanian.

Selain itu, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo adalah Kecamatan yang sudah mendapatkan kartu tani. Akan tetapi pelaksanaan kartu tani yang dilakukan di Kecamatan Krian masih mengalami permasalahan yakni belum berlakunya program kartu tani hingga saat ini dan juga pengetahuan tentang kartu tani yang diperoleh petani masih sangat minim. Program kartu tani yang dilaksanakan di Kecamatan Krian kedepannya diharapkan tepat sasaran dalam mewujudkan pendistribusian pupuk bersubsidi dan pemanfaatan layanan perbankan bagi para petani. Sebagai program pemerintah baru yang ingin diimplementasikan secara nasional, perlu adanya analisis niat petani pada kartu petani. Perilaku tertentu oleh konsumen seringkali ditentukan oleh niat konsumen untuk melakukan perilaku tersebut (Sumarwan, 2011). Niat seseorang terhadap perilaku tertentu dapat dikonstruksi dari tiga dimensi utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Ajzen, 2005). Komponen-komponen tersebut dapat dianalisis menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB).

Pentingnya melakukan analisis niat petani terhadap suatu inovasi baru seperti program kartu tani ini menjadi pertimbangan peneliti untuk menelaah lebih lanjut mengenai niat adopsi kartu tani oleh petani sehingga pada saat program tersebut berjalan dapat meminimalisir kendala yang akan terjadi di tingkat petani. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil Judul **“ANALISIS NIAT ADOPSI KARTU TANI OLEH PETANI DI KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sikap terhadap niat adopsi kartu tani oleh petani di kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana pengaruh norma subjektif terhadap niat adopsi kartu tani oleh petani di kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo?
3. Bagaimana pengaruh kontrol perilaku terhadap niat adopsi kartu tani oleh petani di kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis pengaruh sikap terhadap niat adopsi kartu tani oleh petani di kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo.
2. Menganalisis pengaruh norma subjektif terhadap niat adopsi kartu tani oleh petani di kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo.

3. Menganalisis pengaruh kontrol perilaku terhadap niat adopsi kartu tani oleh petani di kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Sebagai persiapan diri untuk terjun ke dunia kerja.
2. Sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan
3. Mahasiswa mampu membandingkan teori-teori yang telah ada dengan kondisi riil di lapangan.
4. Dapat menguji kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori ilmu agribisnis secara praktis.

1.4.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai tambahan referensi yang dapat dijadikan perbendaharaan ilmu dan pengetahuan terutama tulisan mahasiswa yang dapat direkomendasikan di perguruan tinggi dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penulisan karya ilmiah.

1.4.3 Manfaat Bagi Instansi Terkait

Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan pada program kartu tani yang akan direalisasikan kedepannya.